

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Pemerintah Tanggung Biaya Pewarnaan Minyak

JAKARTA (Media): Pemerintah akan menanggung biaya yang timbul akibat kebijakan pewarnaan minyak tanah untuk rumah tangga. Kebijakan yang diambil untuk menekan penyalahgunaan jatah minyak tanah untuk rumah tangga itu akan menelan biaya sekitar Rp40 miliar.

Untuk tahap awal pewarnaan minyak tanah akan dilakukan di Medan, Jakarta, dan Jawa Barat. Kebijakan itu baru akan diterapkan oleh Pertamina pada Juni 2004 mendatang.

"Pemerintah telah setuju untuk menanggung biaya yang timbul akibat adanya pewarnaan minyak tanah. Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk menekan penyalahgunaan minyak tanah rumah tangga oleh industri," kata Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi usai menghadiri rapat di Departemen Keuangan, kemarin.

Pertamina tidak melakukan kebijakan pewarnaan minyak tanah secara nasional karena berdasarkan data yang ada tidak semua daerah mengalami kelangkaan minyak tanah. Kelangkaan yang disinyalir merupakan rekayasa pihak-pihak tertentu itu hanya terjadi di Medan, Jakarta, dan Jawa Barat. Karena itu, kebijakan pewarnaan baru diterapkan di tiga daerah tersebut.

Direktur Hilir Pertamina Harry Poernomo menambahkan, selain melakukan pewarnaan, Pertamina akan menggandeng kelurahan untuk menjadi agen minyak tanah. Dengan menjadikan kelurahan sebagai salah satu agen, diharapkan terjadi mekanisme kontrol dalam penggunaan minyak tanah di daerahnya.

"Kami belum bisa mengatakan berapa banyak kelurahan yang akan digandeng untuk menyalurkan minyak tanah. Tapi ini akan

ditempuh sebagai salah satu solusi mencegah penyalahgunaan," kata Harry.

Dari data Pertamina, saat ini terdapat agen minyak tanah sebanyak 2.749 agen, sedangkan jumlah pangkalan minyak tanah mencapai 43.083 pangkalan. Karena jumlahnya yang amat besar dan tersebar di banyak tempat, Pertamina kesulitan mengontrol mitra bisnisnya itu.

Di sisi lain, ternyata kebutuhan minyak tanah nasional pada tahun ini meningkat. Bila semula diperkirakan hanya sekitar 11,563 juta kiloliter ternyata akibat adanya pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan meningkat menjadi 12,024 juta kiloliter. Artinya, akan ada kenaikan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap minyak tanah.

"Subsidi tambahan akan diberikan pemerintah terhadap tambahan konsumsi yang diperkirakan meningkat sekitar 500 ribu kiloliter. Berapa besar penambahan subsidi, itu masih dihitung. Tapi prinsipnya pemerintah telah menyadari adanya kemungkinan kenaikan subsidi bagi minyak tanah," jelas Harry.

Suplai gas PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kontraktor migas Amerada Hess pekan depan akan menandatangani perjanjian penjualan gas (*gas sales agreement/GSA*) untuk memasok pembangkit listrik milik PT PLN di Jawa

Timur, sedangkan perjanjian jual-beli gas antara Santos dan anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power (IP) masih menunggu persetujuan PT PLN.

Menurut Wakil Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika pada prinsipnya kedua belah pihak telah menyepakati poin-poin kontrak. Saat ini tinggal menunggu waktu penandatanganan saja, diperkirakan pekan depan hal itu sudah dapat dilakukan.

Rencananya, kata Kardaya, Amerada Hess akan menyuplai gas dari ladang gas Ujung Pangkah, Jawa Timur untuk operasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Gresik mulai 2006. Gas yang akan dialirkan sebanyak 100 juta kaki kubik per hari dengan jangka waktu 20 tahun, sedangkan harga gas yang disepakati sebesar US\$2,38 per MMBTU (*mile mile british thermal unit*).

Selain itu, kesepakatan mengenai jual-beli gas juga telah dicapai antara PT Indonesia Power dan kontraktor bagi hasil migas asal Australia, Santos. Keduanya menyetujui poin-poin yang akan dituangkan dalam kontrak jual beli gas.

Namun, sebelum penandatanganan GSA, Indonesia Power harus melaporkan hasil negosiasi itu ke induknya, PT PLN. Jika Direksi dan Komisaris PT PLN menyetujui, penandatanganan bisa segera dilakukan.

Sementara itu, pokok-pokok persetujuan jual-beli gas antara kedua belah pihak yang tertuang dalam *head of agreement* (HoA) telah ditandatangani beberapa waktu lalu. (JA/Wis/E-4)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pemerintah Sepakat Mendanai Pewarnaan Minyak Tanah

JAKARTA (Suara Karya) : Biaya pewarnaan minyak tanah sebesar Rp 40 miliar akan ditanggung pemerintah. Pewarnaan akan efektif dilakukan dua bulan mendatang. "Biaya Pewarnaan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah dan akan dilakukan pada daerah-daerah khusus yang berpotensi kerugian," kata Dirut PT Pertamina (Persero), Ariffi Nawawi di Departemen Keuangan, kemarin.

Sebelumnya, untuk masalah pewarnaan pemerintah telah menawarkan tiga opsi pembiayaan, yaitu membebaskan biaya pewarnaan minyak tanah kepada industri, Pertamina, atau ditanggung pemerintah yang dimasukkan dalam APBN.

Hasil rapat yang dilakukan oleh menteri terkait bersama dengan Departemen keuangan akhirnya telah memutuskan agar biaya pembebanan ditanggung pemerintah.

Seperti diketahui, zat pewarna

yang digunakan berasal dari Inggris adalah Octel bertipe OIM 200, dan akan dicampurkan sebanyak 33 cc untuk per liter minyak tanah. Harga zat pewarna tersebut sekitar Rp 5,75 per liter.

Dengan langkah pewarnaan minyak tanah ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan peruntukkan minyak tanah untuk masyarakat ke pihak lain termasuk untuk dioplos ataupun dijual kembali kepada industri akibat adanya disparitas harga yang besar yang hampir Rp 1.000 per liter.

Pewarnaan diharapkan bisa dilaksanakan secara nasional terutama pada daerah yang dalam pengamatan benar-benar mengalami kelangkaan pasok minyak tanah.

Menurut Ariffi, pewarnaan akan dilakukan di daerah Jakarta, Medan, dan Surabaya. "Waktu pelaksanaan akan dilakukan sesuai dengan kaidah yang ada. Namun dalam dua bulan mendatang pewarnaan akan dapat dilakukan," ucapnya.

Ariffi juga mengatakan, ke depan untuk minyak tanah, akan ditangani pemerintah daerah

(Pemda). "Kami sudah dapat instruksi dari pemerintah untuk memulai suatu *pilot project* agar masalah minyak tanah melibatkan pemda," ucapnya.

Hal ini menurutnya, bukan sebagai pelarian tanggung jawab Pertamina. Namun, katanya, dengan melibatkan pemda diharapkan akan dapat langsung menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Realisasinya kemungkinan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan mendatang, di mana akan dibentuk pangkalan-pangkalan binaan yang dikelola dan menjadi tanggung jawab di setiap kelurahan. Kepada masyarakat akan diberlakukan kupon untuk mendapatkan minyak tanah sebagai wujud secara tidak langsung dari penjatahan minyak tanah kepada masyarakat.

"Biaya pembinaan akan dianggarkan melalui biaya *community development* dari Pertamina, sebagai kontribusi kepada masyarakat untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah," ucap Ariffi. (CW-1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Pertamina ajukan usulan perubahan subsidi BBM

JAKARTA (Bisnis): Pertamina mengusulkan APBN Perubahan 2004 memasukkan perubahan subsidi BBM menyusul lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dari 11,563 juta kiloliter menjadi 12,024 kiloliter.

Pemerintah melalui Kantor Menko Perekonomian dan Pertamina juga memperkuat jalur distribusi minyak tanah untuk menekan lonjakan kebutuhan dan mengatasi kelangkaan komoditas di pasar, di antaranya rencana pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan itu.

Ariffi Nawawi, Dirut Pertamina, mengatakan tingkat pertumbuhan penduduk, laju perekonomian, dan meningkatnya kreativitas pemanfaatan minyak tanah menyebabkan plafon produk itu dalam APBN 2004 meningkat menjadi 12,024 kiloliter.

"Penambahan alokasi baru akan diajukan pada pembahasan penyesuaian APBN 2004 dengan naiknya subsidi BBM. Tadinya kan masih 11,563 kiloliter. Kami belum menghitungnya tapi patokannya harga minyak di pasar US\$25/barel," katanya di Jakarta kemarin.

Meski demikian, sambungnya, Pertamina masih akan memantau perkembangan kebutuhan BBM terutama minyak tanah sampai Mei 2004 sebelum memutuskan mengajukan usul dalam APBN-P.

Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution sebelum-

nya memperhitungkan kenaikan harga minyak dunia saat ini belum menimbulkan rezeki *nomplok* (*windfall profit*) bagi anggaran, sehingga tidak ada rencana revisi asumsi APBN yang saat ini ditetapkan US\$22 per barel.

Menurut Darmin, justru ada kecenderungan kalau harga minyak dunia naik malah pemerintah harus membayar subsidi yang bertambah. "Sebenarnya kami tidak terlalu menerima dampak dengan kenaikan harga minyak dunia, penerimaan kami se-gitu-gitu saja," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah masih membayar beban kewajiban bagi hasil dengan daerah penghasil minyak.

"Malah ada kecenderungan kalau harga minyak dunia naik tidak terlalu tinggi maka penerimaan pemerintah masih kalah dibandingkan dengan beban yang timbul."

Masih digodok

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Boediono mengatakan pemerintah masih menggodok APBN-P 2004, meski beberapa indikator di dalamnya membutuhkan penyesuaian.

Inti kebijakan pemerintah, tuturnya, tetap sama. Pemerintah, jelasnya, akan melanjutkan kebijakan konsolidasi fiskal dengan melakukan perimbangan antara penerimaan dan pengeluaran ne-

gara sehingga defisit tetap dalam jalur di bawah 1,2% PDB.

"Belum tahu [akan direvisi atau tidak] nanti kita lihat. Asumsi yang jelas RKP-nya kan ada perbedaannya. Gambarnya saya belum tahu tapi penerimaan dan pengeluaran tetap berjalan dengan cukup baik. Kita lihat RKP bisa naik, bisa turun," katanya.

Ariffi menambahkan kelangkaan minyak tanah terutama untuk konsumen rumah tangga di pasar juga akan menambah pengeluaran pemerintah.

Sebab, lanjutnya, negara mesti mengeluarkan dana sekitar Rp40 miliar untuk pewarnaan minyak tanah rumah tangga di Medan, Jakarta, dan Surabaya selama satu tahun.

Lonjakan kebutuhan BBM, katanya, memang langsung berdampak pada subsidi sehingga Pertamina akan mengatur kebutuhan itu a.l. melalui efisiensi jalur distribusi termasuk pelibatan pemda.

Usulan pelibatan Pemda, tuturnya, diharapkan bisa mengontrol pelanggaran konsumsi minyak tanah karena semestinya kebutuhan satu orang dalam satu bulan tidak lebih dari empat liter.

"Isu kelangkaan minyak tanah bukan faktor kebijakan [subsidi] yang menyebabkan perbedaan harga menyolok di pasar. Pemerintah memang wajib memberikan subsidi untuk melindungi masyarakat lemah. (Iuz)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4 TAHUN 2004	

Pemerintah Akan Tambah Alokasi Minyak Tanah Bersubsidi

Subsidi minyak tanah akan naik Rp 4,374 miliar. Pemerintah akan intensifkan pengawasan untuk menekan subsidi.

JAKARTA-Menyusul naiknya permintaan minyak tanah yang menyebabkan kelangkaan di beberapa tempat, pemerintah berencana mengubah alokasi suplai minyak tanah bersubsidi dalam APBN 2004, dari 11,563 juta kilo liter menjadi 12,024 juta kilo liter. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Arifi Nawawi, usai rapat bersama Menko Ekuin, Rabu (14/4) di Jakarta.

Penambahan alokasi minyak tanah sekitar 500 ribu kilo liter itu diperkirakan bakal menambah beban subsidi BBM sekitar

Rp 4,374 miliar.

Penambahan tersebut rencananya akan diajukan pada pembahasan penyesuaian APBN 2004 mendatang. Namun begitu, menurut Direktur Hilir Pertamina Hari Purnomo, meski alokasi bertambah pemerintah berharap subsidi bisa ditekan. "Ini kan baru rencana. Kita akan mengintensifkan dulu pengawasan bersama oleh Timdu, Polri, dan Pertamina. Kalau keadaannya membaik, realisasinya tidak akan segitu," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah masih akan melihat dulu per-

kembangan hingga bulan Mei mendatang. Terkait persoalan tersebut, Arifi mengatakan rapat koordinasi antara Menko Ekuin dan semua instansi terkait telah menyepakati tujuan jangka pendek di tahun 2004, khususnya dalam masa Pemilu, untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak dengan segala cara. Salah satunya, lanjut dia, pemerintah akan mengintensifkan rencana pewarnaan minyak tanah bersubsidi.

Untuk permulaan, pewarnaan akan dilakukan di beberapa wilayah yang dinilai rawan, seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. Biaya pewarnaan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah dan diperhitungkan sebesar Rp 40 miliar per tahun "Itu akan segera dimulai, tapi paling cepat baru dua bulan lagi bisa direalisasikan," imbuhnya.

Selain pewarnaan, Pertamina juga mengajukan usul lain berupa pemberdayaan Pemda dan Kelurahan untuk ikut mengawasi distribusi minyak. Caranya, Pertamina akan membentuk pangkalan binaan di kelurahan yang pengoperasiannya diserahkan pada masyarakat. "Dengan begitu, kita

harapkan masyarakat akan ikut langsung dalam pengawasannya," ujar dia. Pertamina akan membuat proyek percontohan (*pilot project*) dari rencana tersebut dalam 2-3 bulan mendatang. Dalam kesempatan yang sama, ketua Timdu Slamet Singgih menjelaskan, hasil operasi bersama yang telah dilakukan Timdu, Pertamina, dan Polri. Menurut dia, sejak 2001 hingga 2004 pihaknya telah menangani 181 kasus temuan. "Tahun 2004 saja, dari bulan Januari-Maret hanya 14 kasus," kata dia.

Dalam rentang waktu tersebut, lanjut dia, Pertamina juga telah memberikan sanksi kepada 326 penyalur, berupa skorsing, surat peringatan, pemutusan hubungan usaha, dan pemotongan alokasi. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diamankan oleh Timdu sebesar Rp 2,14 triliun dengan biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 10 miliar lebih. (fai)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 3 TAHUN 2004	

Soal Pewarnaan Minyak Tanah

Biaya Ditanggung Pemerintah

Pewarnaan minyak tanah diintensifkan di Jawa Barat, Medan, dan Batam.

JAKARTA — Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menanggung biaya pewarnaan minyak tanah. Namun, pewarnaan minyak tanah itu hanya dilakukan bagi daerah-daerah yang kelangkaan minyak tanahnya tinggi.

"Yang menanggung biaya pewarnaan adalah pemerintah," ujar Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Iin Ariffi Takhyani, dalam jumpa pers setelah mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian, kemarin (14/4) di Jakarta.

Menurut Iin, pewarnaan minyak tanah akan diintensifkan pada daerah yang potensi kelangkaan minyak tanahnya tinggi, terutama di daerah Jawa Barat, Medan, maupun Batam. Namun, je-

las Direktur Hilir PT Pertamina, Hari Purnomo, untuk tahap awal pewarnaan akan dilakukan di tiga wilayah, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya sesuai dengan pengarahannya dari Menko Perekonomian.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan ada kemungkinan biaya pewarnaan minyak tanah ditanggung oleh kalangan industri pengguna minyak tanah. Beban biaya pewarnaan minyak tanah yang sekitar Rp 60 miliar tersebut akan langsung dimasukkan pada harga minyak tanah industri yang kini berkisar Rp 1.700-Rp 1.800 per liter.

Adapun mengenai biaya untuk pewarnaan ini, lanjut Hari, kalau diberlakukan dalam satu tahun, dibutuhkan

dana kurang lebih Rp 40 miliar. Realisasi pewarnaan itu paling cepat dibutuhkan waktu dua bulan lagi. "Kita akan segera mulai, tapi karena realisasinya itu perlu pengadaan dan proses tender maupun pengiriman, paling cepat baru dua bulan lagi. Pertamina harus mengikuti kaidah untuk BUMN," ujarnya.

Hari menambahkan, kemungkinan untuk tahun 2004 ada koreksi tambahan volume penjualan minyak tanah dari semula ditetapkan sebesar 11,563 juta kiloliter menjadi 12,024 juta kiloliter. "Jadi, ada tambahan sekitar 500 ribu kiloliter," terangnya.

Namun, kata Hari, penambahan volume penjualan minyak itu akan dilihat perkembangannya hingga Mei. Kalau pengawasan bisa dilakukan intensif, bisa jadi kenaikan volume penjualan minyak tanah tidak sebesar itu. "Sebagai anggaran bisa

diusulkan 12 juta kiloliter, tapi pelaksanaannya akan ditekan seefisien mungkin, sehingga biaya subsidi juga bisa ditekan."

Iin Ariffi menambahkan, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah kelurahan, agar bisa menjadi pangkalan minyak tanah. Diharapkan, dengan kelurahan menjadi distributor minyak tanah bersubsidi itu, mereka akan ikut bertanggung jawab menjaga ketersediaan minyak tanah dari penyelewengan.

Diakui oleh Iin, penyebab kelangkaan minyak tanah adalah adanya perbedaan harga yang mencolok dari harga masyarakat dan industri. Adanya perbedaan harga ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menjual minyak tanah ru-

mah tangga ke industri, melakukan pencampuran, bahkan penyelundupan ke luar negeri. "Itu yang menyebabkan kelangkaan."

Menurutnya, kelangkaan minyak tanah, bukan disebabkan oleh faktor salah kebijakan pemerintah. Kelangkaan minyak tanah, kilahnya, cenderung disebabkan masalah teknis operasional yang diakibatkan adanya disparitas harga.

Demikian pula, sambungnya, kenaikan harga LPG bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah. "Melainkan semata-mata disebabkan oleh perhitungan komersial PT Pertamina," katanya. Selama ini, dalam perdagangan LPG, Pertamina menanggung kerugian karena harga jualnya lebih rendah dari biaya produksi atau impornya yang terlihat dari tidak adanya penjual LPG selain Pertamina. ■ has

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14											TAHUN 2004																			

Pertamina Ajukan Tambahan Subsidi Minyak Tanah

— Karena Koreksi Volume Suplai Minyak Tanah Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS — Pertamina mengajukan anggaran tambahan subsidi harga minyak tanah tahun 2004, menyusul koreksi volume suplai minyak tanah. Suplai minyak tanah tahun 2004 yang semula ditetapkan 11,5 juta kiloliter kemungkinan akan dikoreksi hingga 12 juta kiloliter, atau akan ada tambahan volume suplai hingga 500.000 kiloliter.

Hal itu dikemukakan Direktur Hilir Pertamina Harry Poernomo pada jumpa pers hari Rabu (14/4) di Departemen Keuangan, Jakarta. Dia menyajikan angka-angka yang membingungkan dan meminta pers menghitung sendiri besar tambahan subsidi minyak tanah.

Jumpa pers tersebut membahas kelangkaan minyak tanah. Pada jumpa pers itu hadir pula Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi dan Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (TP3-BBM) Slamet Singgih.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004, subsidi BBM ter-

catat Rp 14,527 triliun, yang sebagian besar diperuntukkan bagi subsidi minyak tanah.

Ariffi menuturkan, penyebab langkanya minyak tanah saat ini adalah adanya perbedaan harga yang mencolok antara harga untuk masyarakat dan harga industri.

Untuk itu, ia menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. "Pertama, dalam jangka pendek ini terutama menghadapi masa Pemilu 2004, kelangkaan minyak tanah ini harus bisa diatasi dengan segala macam cara," kata Ariffi.

Pertamina sendiri, lanjut dia, bermaksud memberdayakan pemerintah daerah (pemda) dan kelurahan sebagai penyalur mi-

nyak tanah, dengan menggunakan sistem kupon. Diharapkan dalam dua-tiga bulan ini hal tersebut dapat direalisasikan.

"Kedua, pewarnaan minyak tanah akan kami intensifkan, khususnya pada daerah-daerah yang langka minyak tanah seperti Jawa Barat, Medan, Batam," kata Ariffi. Ketiga, kelebihan permintaan menyusul kelangkaan minyak tanah akan menyebabkan perlunya koreksi anggaran.

Biaya pewarnaan

Harry menjelaskan, biaya pewarnaan minyak tanah akan ditanggung pemerintah, dan baru sekitar dua bulan lagi proses itu terealisasi. "Sementara pewarnaan akan dilakukan di wilayah Medan (Sumatera Utara), Jakarta, dan Surabaya (Jawa Timur). Kalau satu tahun kita berlakukan, besaran biaya yang kita perlukan lebih kurang Rp 40 miliar," kata Harry.

Menurut Harry, kebutuhan wajar minyak tanah per kepala per bulan tidak lebih dari empat

liter. "Kalau konsumsi nasional dikalikan jumlah penduduk melampaui batas itu, pasti minyak tanah ada yang digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti motor tempel nelayan, pengeringan tembakau di sentra-sentra perkebunan tembakau, dan mesin pompa air di persawahan," kata Harry.

Sementara itu, Slamet Singgih menyebutkan, sepanjang Januari-Maret 2004 TP3-BBM telah menyerahkan 14 kasus pelanggaran legal kepada aparat penegak hukum. Jika dihitung dari tahun 2001, TP3-BBM telah menyerahkan 181 kasus kepada aparat hukum.

"Temuan yang dapat diamankan dari pelanggaran-pelanggaran selama tahun 2001-2004 itu mencapai Rp 2,145 triliun, dengan biaya sekitar Rp 10 miliar," tambah Slamet.

Pertamina sendiri sejauh ini telah memberi sanksi kepada 326 agen penyalur minyak tanah. Sanksi yang diberikan berupa skorsing, pemutusan hubungan usaha, dan pemotongan alokasi. (HAR/FEY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2004

Minyak Tanah Langka di Sumsel

Palembang, NERACA

Persediaan minyak tanah di Sumatera Selatan dalam dua minggu terakhir ini langka, terutama di kota Palembang dan sekitarnya. Aki-batnya, untuk memperolehnya, banyak anggota masyarakat yang harus antre di pangkalan dan agen-agen minyak tanah yang ada.

Terjadinya kelangkaan minyak tanah di Sumsel ini, berdasarkan pemantauan *Neraca*, terjadi hampir serentak di setiap kecamatan di Palembang, antara lain, Kecamatan Sako, dan Kertapati Palembang.

Menurut General Manager Pertamina UPMS II Wisnuntoro, salah satu pemicu kelangkaan minyak tanah ini terjadinya karena adanya perbedaan harga antara minyak bersubsidi untuk masyarakat dengan industri. Perbedaan inilah yang membuat penyaluran minyak tanah itu disimpangkan, guna mencari keuntungan.

"Salah satu cara untuk menutup kemungkinan penyimpangan penyaluran adalah dengan menghilangkan perbedaan harga," kata Wisnuntoro ketika menghadiri rapat koordinasi, Senin (12/4) lalu.

Saat ini, di pasaran Palembang, harga satu liter minyak tanah untuk masyarakat mencapai Rp 1.300, padahal harga subsidi sebesar Rp 880/liter. Sementara harga untuk industri Rp 1.800/liter, dan akibat perbedaan harga ini ada kecenderungan oknum pedagang pangkalan dan agen melakukan penyimpangan sehingga membuat warga resah.

Pada saat terjadi kelangkaan minyak tanah 1997, umumnya tidak membuat warga resah, karena harga jual tidak ada perbedaan antara industri dan rumah tangga. Kendati demikian untuk wilayah Sumsel, katanya, kondisi ini belum memprihatinkan. Sebab, dalam sehari suplai minyak tanah dari Pertamina UPMS mencapai 1.000 ton, khusus untuk kebutuhan rumah tangga.

Namun, dia mengakuinya bahwa angka ini tanpa memperhitungkan keperluan pedagang kecil pinggir jalan seperti speed boat.

Yang pasti, satu-satunya jalan yang dilakukan Pertamina UPMS untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah dengan cara operasi pasar. Di sisi lain pihak UPMS sudah mempejajari dan minta dukungan pemerintah provinsi untuk mengajukan tambahan kuota minyak tanah 2,5%. (tis/K6)

17

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6.6

TAHUN 2004

Minyak Tanah Langka di Palembang

Pertamina Jawa Tengah menduga ada penjualan minyak tanah jatah rumah tangga kepada industri.

PALEMBANG — Krisis minyak tanah di kota Palembang makin hari makin menjadi-jadi. Beberapa pangkalan minyak tanah mengaku jatah mereka sudah beberapa hari ini dikurangi dari biasanya. Sebuah pangkalan minyak tanah di Jalan Riau, sudah dua hari ini memasang tulisan besar di atas kayu tripleks, "Minyak tanah habis".
Puluhan drum kosong di pangkalan milik Sutejo, 50 tahun, di Jalan Candiwelan, menja-

di saksi bisu tidak adanya minyak tanah di kota Palembang. Kondisi itu makin tergambar dengan antrean gerobak dorong penjual minyak eceran. "Makin susah, Mas, minyak tanah," ujar Sutejo kepada *Tempo News Room*, Rabu (14/4).

Menurut Sutejo, beberapa pangkalannya tidak lagi mendapat kiriman sesuai dengan jatah normal. "Saya biasanya mendapat kiriman tiga kali dalam seminggu, isinya masing-masing 5.000 liter. Sekarang saya hanya mendapat kiriman dua kali, ke mana yang satunya?"

Biasanya dia mendapatkan jatah pada Senin, Kamis, dan Sabtu, tapi sekarang jadwal pengirimannya hanya Selasa dan Sabtu. Karena kurangnya jatah, Sutejo kesulitan mendistribusikan minyak tanah kepada pengecer yang akan

membawa bahan bakar ini ke kampung-kampung. Tidak dikurangi saja, menurut dia, jatah minyak tanahnya tidak cukup.

Sutejo menjual minyak tanah ke pengecer seharga Rp 950 per liter, walaupun di papan usaha pangkalannya ditulis harga eceran tertinggi Rp 750 per liter. Sementara itu, para pedagang eceran akan menjual Rp 1.200-1.300 per liter.

Jall, 35 tahun, pedagang eceran di daerah Bukit Besar, mengatakan, dirinya sulit mendapatkan minyak tanah di pangkalan. "Kalaupun ada, saya terpaksa dijatah 30-40 liter saja."

Menanggapi krisis minyak tanah di Sumatera Selatan, Pertamina Unit Pemasaran II Sumatera akan meminta tambahan kuota untuk provinsi ini. *General Manager* Pertamina Unit Pemasaran

II Wisnuntoro, se usai rapat koordinasi kelangkaan minyak tanah di Sumatera Selatan, mengatakan, pihaknya berusaha meminta tambahan kuota karena jatah Sumatera Selatan dikurangi 2,5 persen dari 1.000 ton per hari. "Mestinya dari 2,5 persen itu jangan dikurangi, tetapi harus ditambah 2,5 persen lagi," ujarnya.

Wisnu menjelaskan, pemerintah pusat tidak menghitung lagi kebutuhan minyak tanah yang dipakai oleh *speedboat* dan pedagang kecil lainnya. Pusat hanya melihat kebutuhan nasional sekian dan kebutuhan daerah sekian, sehingga ada kelangkaan minyak tanah. Menurut dia, kelangkaan minyak tanah ini bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi sudah menjadi persoalan nasional.

Untuk mengantisipasi kelangkaan minyak di masyarakat, Per-

tamina hanya bisa melakukan operasi pasar di daerah yang kurang minyak. "Sampai saat ini telah 3.000 liter minyak operasi pasar kita turunkan ke masyarakat," Wisnu menambahkan. Pertamina sudah memberi sanksi pada lima agen yang nakal di Lampung dan Palembang.

Kelangkaan minyak tanah juga masih terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Pertamina Unit Pemasaran IV Jawa Tengah dan Yogyakarta menduga kekurangan minyak tanah ini karena penyimpangan penyaluran, yakni minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dipakai untuk kepentingan industri. "Karena hal itu dianggap lebih menguntungkan," ujar I Gusti Bagus Wisnu, Kepala Humas Pertamina Unit Pemasaran IV, kemarin.

Dia mengemukakan, di beberapa kota industri di Jawa Tengah, seperti Semarang, Cilacap, dan Surakarta, permintaan akan minyak tanah cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Di Semarang kebutuhan mencapai 425 ribu liter, sedangkan di Surakarta 130 ribu liter.

Menurut Bagus, kuota minyak tanah untuk wilayahnya cukup. "Distribusi Pertamina Unit Pemasaran IV Jawa Tengah-DIY setiap harinya mencapai 4.766 kiloliter per hari. Distribusi ini sudah seperti biasanya," ujarnya.

Ketika ditanya letak penyimpangan dari Pertamina ke agen atau dari agen ke pangkalan, Wira Pemasaran Pertamina Unit Pemasaran IV Umar Chatib mengaku belum mengetahuinya. "Kita masih mengecek."

● arief ardiansyah/dian yuliatusti

18

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14	15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31							

HALAMAN : 9

TAHUN 2004

Minyak Tanah Sulit Diperoleh di Sumsel

Kelangkaan minyak tanah diduga karena penyimpangan penyaluran.

PALEMBANG — Bukan jaminan sebagai daerah penghasil dan pengolah minyak bumi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak akan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) khususnya minyak tanah di daerah ini justru sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir, dan kini kelangkaannya semakin parah.

Akibat kelangkaan tersebut harga minyak tanah di Sumsel, khususnya di kota Palembang membumbung tinggi mencapai harga Rp 1.500/liter. Atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yang harusnya sekitar Rp 890/liter.

Sampai Rabu (14/4) akibat kelangkaan itu, di beberapa pangkalan distribusi minyak tanah terlihat antrean warga untuk membeli minyak tanah. Antrean terlihat di dua pangkalan minyak yang ada di Jl Jaksa Agung R Suprpto. Setiap warga yang membeli minyak tanah dibatasi sebanyak 5 liter/orang.

Terhadap kelangkaan tersebut, Gubernur Sumsel telah memanggil General Manager (GM) Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) II, Wisnuntoro untuk melakukan rapat koordinasi membahas kelangkaan tersebut dengan dipimpin Wakil Gubernur Mahyuddin NS.

Menurut Wisnuntoro, salah satu penyebab kelangkaan minyak tanah di Sumsel

adalah akibat dikurangnya kuota hingga 2,5 persen dari kebutuhan masyarakat yang mencapai 1.000 ton/hari.

Untuk mengatasi masalah pengurangan kuota tersebut, Wisnuntoro menyarankan agar pihak Pemprov Sumsel meminta kepada pemerintah pusat atau melalui DPR untuk dapat mengembalikan kuota minyak tanah bagi daerah ini hingga 5 persen. Ini dimaksudkan agar kebutuhan minyak tanah di Sumsel dapat terpenuhi.

Untuk mengatasi kelangkaan di beberapa tempat, Pertamina UPMS II melakukan operasi pasar (OP) dengan jumlah yang bisa mencapai 25 ton setiap harinya. Dalam rapat koordinasi juga terungkap dari Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumsel bahwa kelangkaan minyak tanah di daerah ini diduga karena adanya penyelewengan minyak tanah. Minyak tanah yang sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat diselewengkan ke pihak industri, karena harga industri cukup mahal.

Wagub Mahyuddin mengatakan, semua instansi terkait haruslah ikut memberikan upaya untuk pengamanan minyak tanah di Sumsel, agar kelangkaan dapat diatasi dan tidak lagi berkepanjangan.

Kelangkaan minyak tanah juga terjadi di beberapa lokasi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. PT Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) IV Jateng dan DIY menduga kekurangan minyak tanah di beberapa lokasi karena ada penyimpangan penyaluran. Minyak tanah yang semula untuk keperluan rumah tangga digunakan untuk kepen-

tingan lain seperti industri.

Kepala Humas Pertamina Unit Pemasaran IV DIY-Jateng I Gusti Bagus Wisnu SH mengatakan bahwa kuota atau persediaan minyak tanah di Wilayah Unit Pemasaran IV Jateng-DIY terbilang cukup. "Distribusi Pertamina Unit Pemasaran IV Jateng-DIY setiap harinya mencapai 4.766 kilo liter per harinya," ujar Wisnu kepada wartawan di Kantornya Rabu (14/4).

Wisnu menyebutkan bahwa untuk Kota Semarang persediaan minyak tanah terbilang cukup setiap harinya yakni sebanyak 425 ribu liter per hari. Semula Wisnu menduga kelangkaan itu karena diakibatkan meningkatnya permintaan untuk kebutuhan rumah tangga akan minyak tanah menyusul melonjaknya harga Gas Elpiji di pasaran. Selain dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, ia menduga karena minyak tanah dipakai oleh para nelayan dan sopir bus/truk untuk kebutuhan pengirisan bahan bakar dengan melakukan oplasan dengan bahan bakar solar dan kemudian dikenal dengan istilah irek (irit dan ekonomis).

Karena dinilai kebutuhan minyak tanah mencukupi, Kepala Humas Pertamina Unit IV Distribusi Jateng-DIY didampingi Wira Pemasaran Umar Chatib menduga kelangkaan yang ada, disebabkan adanya penyimpangan penyaluran. "Penyimpangan ini diduga akibat ulah oknum tertentu yang menjual minyak tanah untuk jatah rumah tangga ke industri. Karena hal itu dianggap lebih menguntungkan," ujar Wisnu. ■ oed/sya

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 5	
TAHUN 2004	

Minyak tanah masih seret di Batam & Tambak Lorok

BATAM (Bisnis): Kendati Pertamina sudah menambah pasokan ekstra (*extra dropping*) minyak tanah hingga 150.000 liter dalam tiga hari terakhir, namun tetap saja kelangkaan masih terjadi di beberapa kawasan di Batam.

Irto Petrus Ginting, Humas Pertamina Batam Terminal, mengakui kelangkaan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan oleh sikap panik yang berlebihan oleh masyarakat akibat beberapa isu yang berkembang.

"Padahal sesuai perhitungan, tidak mungkin ada kelangkaan sebab kebutuhan masyarakat sudah diantisipasi dengan pasokan dan *extra dropping*," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa.

Untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, Pertamina telah menambah pasokan ekstra sebanyak 150.000 liter yang dibagi selama tiga hari di beberapa kawasan padat. Padahal sebelumnya, Pertamina juga sudah menambah pasokan minyak tanah kepada 366 pangkalan mencapai 129.000 liter per hari.

Akibat kelangkaan yang terjadi, harga minyak tanah di beberapa tempat di Batam sudah melambung tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Pantauan *Bisnis* di beberapa tempat menyebutkan satu liter minyak tanah dijual beragam mulai Rp1.000 hingga Rp1.200 per liter. Sedangkan harga HET sebesar Rp920 per liter.

Irto tetap berkeyakinan bahwa kelangkaan itu disebabkan *panic buying* oleh masyarakat, sehingga pasokan menjadi cepat habis di pasaran. Bahkan Pertamina pernah menemukan konsumen yang menumpuk persediaan minyak tanah untuk dua bulan.

"Tambahan pasokan 50.000 liter per hari ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan minyak di beberapa tempat, sedangkan pasokan rutin sebanyak 129.000 liter per hari tetap kami jalankan," paparnya.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi pendistribusian minyak tanah di Pemko Batam menyepakati untuk mendistribusikan minyak

tanah langsung ke pangkalan yang mengalami kelangkaan.

Pendistribusian melalui pasokan ekstra 150.000 liter ini, menurut Arifin Nasir, asisten II Pemko Batam, bertujuan mengatasi kelangkaan di daerah yang memang mengalami keterbatasan minyak.

Sementara itu, dari Jawa Tengah dilaporkan perpindahan aktivitas nelayan di pantai utara (Pantura) ke Tambak Lorok memicu kelangkaan minyak tanah di Semarang.

Jamani, pemilik pangkalan minyak tanah di kawasan Tambak Lorok mengatakan musim udang, rajungan dan cumi-cumi di wilayah perairan Laut Semarang mengakibatkan daerah tangkapan itu diserbu nelayan Pantura, terutama dari Demak, Jepara, Kendal dan Batang.

"Akibatnya permintaan minyak tanah dari nelayan di Tambak Lorok meningkat pesat, sehingga terjadi kelangkaan dalam beberapa hari lalu, tapi sekarang sudah normal kembali," ujarnya kepada *Bisnis* di Semarang kemarin. (sus/bar)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 17	TAHUN 2004

Nelayan Demak 'Serbu' Pangkalan Minyak di Semarang

SEMARANG (Media): Ratusan nelayan asal Kecamatan Moro Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), kemarin, menyerbu pangkalan minyak tanah di Tambak Lorok, Semarang.

Menurut para nelayan yang sedang membeli minyak tanah di kawasan Tambak Lorok, mereka terpaksa membeli ke luar wilayahnya karena di Moro Demak bahan bakar itu sulit diperoleh. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp.1.400 hingga Rp1.600 per liter.

"Selisih harga yang lumayan besar itu dapat kita gunakan untuk menambah biaya melaut," kata Warsito, salah seorang nelayan, ketika tengah berada di salah satu pangkalan.

Pengakuan Warsito dibenarkan oleh para pemilik pangkalan minyak tanah di Tambak Lorok. Menurut mereka, nelayan yang membeli bahan bakar tersebut bukan hanya dari Moro Demak, tetapi juga nelayan asal Kabupaten Jepara.

Akibat banyaknya pembeli dari luar wilayah Semarang, harga minyak tanah di kawasan ini melonjak hingga Rp1.200 per liter, lebih tinggi dari harga resmi yang hanya Rp885. Bahkan beberapa hari lalu sempat terjadi kelangkaan.

Salah seorang pemilik pangkalan mengatakan, para nelayan membeli minyak tanah sebagai bahan bakar pengganti solar untuk perahu motor. Selain penggunaannya lebih irit, harganya pun lebih murah dibandingkan dengan solar, sehingga dapat menghemat biaya operasional melaut.

"Soal kerusakan mesin tempel perahu akibat penggunaan bahan bakar minyak tanah ternyata sudah diperhitungkan dengan biaya operasional sehari-hari," ujar salah seorang pemilik pangkalan minyak tanah di Puskopol Tambak Lorok.

Sementara itu, Kepala Wira Penjualan Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) Semarang, Umar Chatib, menyatakan pihaknya melalui para agen resmi tidak pernah terlambat memasok jatah minyak tanag kepada pangkalan.

"Bahkan, karena banyaknya masyarakat yang menjerit kekurangan minyak tanah, 29 agen minyak tanah yang ada di Kota Semarang berinisiatif melakukan operasi pasar," Umar Chatib kepada *Media* di Semarang, kemarin. Dia mengatakan itu berkaitan dengan keluhan masyarakat yang menyatakan terjadi kelangkaan minyak tanah di Semarang.

Menurutnya, operasi pasar yang dilakukan oleh para agen dimulai 19 Maret lalu dan akan berlangsung hingga kebutuhan minyak tanah terpenuhi.

Sedangkan Humas Pertamina UPMS IV Jateng/Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) I Gusti Bagus Wisnu menambahkan, selama kebutuhan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga belum tercukupi, Pertamina akan terus melakukan operasi pasar.

Karena itu, dia merasa heran

mengapa ada pangkalan yang sehari-hari tidak memperoleh pasokan minyak tanah. "Menurut laporan yang saya terima dari para agen, minimal masing-masing pangkalan mendapatkan pasokan sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu," kata Wisnu.

Stok cukup

Dari Palu dilaporkan, hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama depot Pertamina setempat pada agen dan pangkalan di empat kecamatan tidak ditemukan terjadinya kelangkaan minyak tanah.

"Setelah kami bersama Pemprov Sulteng mengecek di lapangan, ternyata tidak ditemukan adanya kelangkaan minyak tanah di Kota Palu," kata Kepala Wira Penjualan Pertamina Sulteng Arief Prianto didampingi Kabag Informasi Pasar Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulteng Eda Nurely kepada wartawan di Palu, kemarin.

Arief mengatakan itu sehubungan adanya informasi tentang kelangkaan minyak tanah di Kota Palu beberapa hari. Dia khawatir informasi tersebut memicu masyarakat untuk memborong minyak tanah.

Menurut Arief, pihaknya setiap hari menyalurkan sebanyak 57.500 liter minyak tanah ke empat kecamatan sesuai dengan kebutuhan warga Palu. Malah, katanya, Pertamina tidak lagi melakukan operasi pasar karena stok yang ada di pangkalan dan agen masih mencukupi kebutuhan. (HT/HF/N-2)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10	TAHUN 2004

■ Kontrak Blok Migas

DPR Akan Kaji Ulang Perpanjangan Kontrak Blok Kangean oleh BP Indonesia

Jakarta, NERACA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Agusman Effendi menegaskan, DPR akan mengkaji kembali rekomendasi yang pernah disampaikan mengenai perpanjangan kontrak BP Indonesia untuk lapangan migas Terangsirasun, Blok Kangean, Jawa Timur. Menurutnya, kaji ulang itu dianggap perlu menyusul rencana penjualan seluruh saham BP di blok tersebut kepada investor baru.

Kepada wartawan di Jakarta kemarin, ia mengungkapkan, kajian tersebut rencanakan akan dilakukan pada masa persidangan mendatang, setelah berakhirnya masa reses. "Rencana penjualan saham BP Kangean memang di luar dugaan karena hingga masa sidang DPR berakhir beberapa waktu lalu, tak terdengar kabar mengenai hal itu. Kalau memang benar semua sahamnya mau dijual, kami akan kaji kembali atas persetujuan yang pernah diberikan," kata Agusman.

Seperti diketahui, DPR secara prinsip telah menyetujui permintaan perpanjangan kontrak BP di Kangean. Pemberian persetujuan itu dilakukan pada saat rapat dengar pendapat antara DPR dengan BP beberapa waktu lalu. Selanjutnya, persetujuan itu disampaikan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Agusman, persetujuan itu diberikan berdasarkan sejumlah komitmen yang disampaikan BP. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, BP sangat berharap agar perpanjangan kontrak bisa diberikan. "Perusahaan minyak asal Inggris itu juga berjanji akan menambah nilai investasinya di lapangan gas tersebut," tegasnya.

BP merupakan kontraktor bagi hasil di lapangan gas Terangsirasun dan lapangan Pagerukan, Blok Kangean. Kontrak mereka baru akan berakhir tahun 2010 mendatang. Namun sejak tahun lalu BP telah mengajukan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030.

Permintaan perpanjangan kontrak yang diajukan BP menuai polemik, karena BP dinilai cacat dalam mengelola blok itu, misalnya tak bisa memenuhi kewajibannya memasok gas hingga 600 juta kaki kubik/hari. Saat itu BP hanya mampu sediakan 200 juta kaki kubik.

Menurut Agusman, semua yang telah dilakukan BP di Kangean, termasuk ketidakmampuannya memenuhi komitmen pasokan dan penjualan saham, akan menjadi pertimbangan DPR dalam melakukan kajian ulang. Meski begitu, ia menilai DPR tidak bisa melarang rencana penjualan saham BP karena merupakan masalah bisnis. "Adalah hak mereka melakukan itu. Ini bisnis," ujarnya.

Mantan Ketua Umum REI ini mengatakan, bagi Indonesia, yang penting lapangan gas itu bisa segera berproduksi. Siapa pun pemilik Kangean nantinya harus berkomitmen untuk mengembangkan lapangan itu. Pengembangan ini penting agar gas bisa dihasilkan untuk memenuhi kebu-

tuhan industri dan pembangkit listrik di Jawa Timur.

"Sudah terlalu lama Jawa Timur mengalami kekurangan suplai gas. Kita berharap pengembangan lapangan baru nanti bisa segera mengatasi kekurangan itu, tentu dengan proses dan prosesur yang benar," tuturnya.

Neraca mencatat, persetujuan DPR atas perpanjangan Kangean sudah disampaikan Ketua Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR, Saul De Ornay. Namun saat itu, belum ada informasi mengenai rencana BP Indonesia menjual sahamnya kepada investor baru, Medco Energy milik Arifin Panigoro. "Secara prinsip kita menyetujui perpanjangan kontrak BP di Jatim," katanya.

Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan mengapa DPR akhirnya secara prinsip menyetujui perpanjangan tersebut. "Satu diantaranya adalah tingginya kebutuhan gas alam di Jatim, sementara pasokan yang ada tidak mampu mencukupi," katanya. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4 TAHUN 2004											

DPR Akan Kaji Ulang Perpanjangan Kontrak BP Indonesia di Lapangan Terang Sirasun

JAKARTA-DPR akan mengkaji ulang persetujuan yang pernah diberikan untuk perpanjangan kontrak British Petroleum (BP) Indonesia di lapangan migas Terang Sirasun, Blok Kangean, Jawa Timur. Pengkajian ulang tersebut dilakukan terkait rencana penjualan saham BP pada blok tersebut. Demikian ungkap Ketua Komisi Energi dan Pertambangan DPR, Agusman Efendi, kemarin (14/4) di Jakarta.

Menurut dia, rencana penjualan blok Terang Sirasun oleh BP tersebut di luar dugaan. Sebab saat masa sidang DPR berakhir beberapa waktu lalu hal

itu sama sekali belum terdengar. DPR menyetujui permintaan perpanjangan kontrak tersebut saat rapat dengar pendapat antara DPR dengan BP beberapa waktu lalu untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

"Tapi, kalau memang benar sekarang semua sahamnya mau dijual, kami akan kaji kembali persetujuan yang pernah diberikan," ujarnya. Bahkan, kajian tersebut menurutnya akan dilakukan pada masa persidangan mendatang, segera setelah berakhirnya masa reses.

Menurut Agusman, persetu-

juan tersebut sebelumnya diberikan DPR berdasarkan sejumlah komitmen yang disampaikan BP. Bahkan, lanjut dia, dalam pertemuan sebelumnya BP berjanji akan menambah nilai investasinya di lapangan gas tersebut. Kontrak BP atas lapangan gas Terang Sirasun dan Pagerungan, Blok Kangean, tercatat akan berakhir 2010 mendatang.

Lebih lanjut, Agusman menegaskan, semua yang telah dilakukan BP di Kangean, termasuk ketidakmampuannya memenuhi komitmen pasokan dan penjualan gas, akan menjadi pertimbangan

DPR dalam kajian ulangnya. Namun begitu, DPR tidak bisa melarang rencana penjualan tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan masalah bisnis dan memang menjadi hak BP.

Menurut dia, bagi Indonesia yang terpenting adalah lapangan gas tersebut bisa segera berproduksi. "Siapa pun pemilik Kangean nantinya harus berkomitmen untuk mengembangkan lapangan itu. Pengembangan ini penting agar gas bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik di Jawa Timur," katanya. Sementara itu, secara terpisah, Direktur PT

Medco Energi International Tbk (MEDCO), Rashid Mangunkusumo menyatakan belum bisa memberi komentar sekitar iktunya Medco dalam tender lapangan migas yang dimiliki BP tersebut. "Saya masih belum bisa memberi informasi mengenai hal itu," ujarnya.

Ia beralasan, informasi tersebut mungkin saja akan mempengaruhi harga saham MEDCO di lantai bursa. Pasalnya, pembelian lapangan migas terkait erat dengan kinerja perusahaan di masa datang. "Jadi nanti saja kalau tender sudah dilaksanakan atau dimenangkan," tambahnya. (fai)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			11 12	13 14	15 16	17 18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30 31			
HALAMAN : 14										TAHUN 2004	

BP Migas Desak Total Indonesia Membayar Klaim Kontraktor Senilai 7,1 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), mendesak perusahaan minyak asal Perancis, Total E & P Indonesia, untuk segera membayar klaim kepada beberapa kontraktor senilai 7,1 juta dolar AS. Namun, BP Migas tidak memberikan batas waktu pembayaran klaim harus dilakukan.

Demikian diutarakan Deputi Kepala BP Migas Bangun Usman Harahap kepada wartawan se usai bertemu dengan wakil dari kontraktor dan pekerja yang terkait dengan klaim tersebut pada hari Rabu (14/4). Menurut Bangun, BP Migas memberikan kesempatan kepada

da Total Indonesia untuk menyelesaikan masalah internal yang terkait dengan klaim tersebut.

"Sebenarnya Total Indonesia sudah sepakat dengan BP Migas untuk membayar klaim tersebut, namun realisasi pembayaran tertunda karena ada audit internal terlebih dahulu dari kantor pusatnya. Jadi, penundaan bukan karena Total Indonesia memperlumahkan jumlah klaim," ujar Bangun.

Bangun mengatakan, BP Migas memahami bahwa klaim tersebut juga bagian dari upah para buruh yang dipekerjakan oleh para kontraktor. Oleh karena itu, BP Migas tetap mendesak Total Indonesia untuk

menyelesaikan masalah internalnya lebih cepat dan segera membayar klaim tersebut.

Sekjen Dewan Eksekutif Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Muhammad Rodja mengatakan, tuntutan klaim ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Lembaga tersebut mendampingi para kontraktor karena terkait dengan masalah nasib para buruhnya.

Rodja mengatakan, masalah tertundanya pembayaran pada kontraktor telah menyebabkan timbulnya efek "domino" yang antara lain ikut menyengsarakan para buruh. Akibat Total Indonesia tidak membayar tagihan kontraktor, sejumlah sub-

kontraktor kolaps, dan ini berakibat pemutusan hubungan kerja atas para buruhnya.

Menurut Rodja, sebenarnya tuntutan dari kontraktor jauh lebih besar, tetapi setelah diaudit oleh BPKP, jumlah yang wajib dibayar Total Indonesia hanya senilai 7,1 juta dolar AS. Pihaknya mendatangi BP Migas untuk meminta kepastian dan dukungan agar klaim segera dibayar oleh Total Indonesia.

Namun, terkait pembayaran klaim, sebagian besar menjadi tanggungan pemerintah karena terikat perjanjian biaya yang dapat diganti dari penjualan minyak. Artinya, yang membayar klaim terbesar justru Pemerintah Indonesia. (BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

BP Migas - Total Bantu Pengembangan Warga Kutai Kartanegara

BALIKPAPAN (Suara Karya): Dana sekitar empat miliar rupiah lebih diberikan pihak BP Migas Kalimantan dan Total E&P Indonesia kepada masyarakat Muara Jawa Ilir, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), awal bulan Maret lalu. "Tetapi tidak semua bantuan kami itu berupa dana, melainkan juga ada yang dalam bentuk proyek pengembangan masyarakat yang telah dilakukan selama tahun 2003 lalu," ungkap Kepala Departemen Komunikasi Total E&P Indonesia Vita Dharmawan kepada pers di Balikpapan.

Proyek pengembangan masyarakat yang berjumlah sekitar 101 proyek tersebut, jelas Vita, dilakukan di 24 desa wilayah Kecamatan Anggana, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja dan Sangasanga. "Proyek-proyek tersebut meliputi berbagai sektor pendirian, melalui bantuan dana dan pendampingan masyarakat telah membangun dan merehabilitasi sekolah serta menyelenggarakan berbagai pelatihan," urai Vita Dharmawan.

Sektor kesehatan, tambah dia, bersama masyarakat melaksanakan pelatihan bagi dokter dan paramedis dari empat puskesmas, pelatihan kader kesehatan desa, pengobatan massal, bantuan peralatan puskesmas serta pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Bantuan dana dan proyek itu menyerap dana sekitar Rp 4.018.631.441.

"Di sektor ekonomi, telah diselenggarakan berbagai pelatihan di bidang peternakan, pertanian dan perikanan serta pengembangan usaha kecil. Sedangkan untuk pengembangan prasarana, masyarakat setempat telah membangun atau merenovasi rumah-rumah ibadah, jembatan, dan semenisasi gang," papar Vita Dharmawan lagi.

Pemberian bantuan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar Drs Samsuri Aspar MM, Kepala Kantor Perwakilan BP Migas Kalimantan-Sulawesi James Runtu, Manajer Humas Total E&P Indonesia E Kartono Hadi dan lainnya. Selain penyerahan proyek, juga dilakukan peresmian pengadaan air bersih di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Proyek ini mampu menyediakan air bersih bagi sekitar 300 kepala keluarga (KK). Pendanaannya berasal dari BP Migas - Total E&P Indonesia sebesar Rp 244.891.500 dan swadaya masyarakat sekitar Rp 90 juta.

BP Migas-Total E&P Indonesia tidak saja sangat peduli terhadap pengembangan masyarakat Kukar, namun juga peduli terhadap sejumlah organisasi sosial, olahraga dan lembaga pendidikan yang telah menyerap dana sekitar Rp 276.055.016. "Bantuan-bantuan tersebut tidak saja makin membuat akrab pihak perusahaan dan masyarakat, namun juga akan makin harmonis hubungan kedua belah pihak dan disamping itu kehidupan masyarakat akan makin lebih baik lagi dari waktu ke waktu," pungkas Vita. (Her)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B.6

TAHUN 2004

"Pemerintah Harus Ikut Bayar Karaha"

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak ingin menanggung pembayaran klaim sebesar US\$ 294 juta (Rp 2,5 triliun) kepada Karaha Bodas Company (KBC). Perusahaan milik negara itu meminta pemerintah dan PLN ikut menanggung beban pembayaran tersebut. "Usulan kami, kalau bisa, jangan hanya Pertamina yang membayar, pemerintah harus ikut," ujar Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi kemarin.

Menurut Ariffi, persetujuan dengan KBC bukan hanya dengan Pertamina. "Siapa bilang? Pemerintah yang memutuskan kontrak, kok. Pertamina mau tidak memutuskan kontrak," katanya berkilah. Karena itu, pemerintah bersama Pertamina dan PLN akan duduk bersama mencari jalan keluar untuk membayar klaim tersebut.

Saat ini, kata Ariffi, skenario pembayaran klaim akan ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. "Men-

teri koordinator Perekonomian adalah koordinator untuk masalah KBC," ujarnya. Salah satu skenario yang dibahas, adalah kemungkinan menggunakan dana yang dibekukan di Bank of New York dan Bank of America untuk pembayaran klaim tersebut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menolak memberikan penjelasan mengenai rencana pembayaran klaim tersebut. Dia mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari Pertamina. "Vocal point-nya ada di Pertamina," ujarnya. Hingga saat ini, pemerintah belum mengagendakan rencana pembayaran klaim kepada KBC di sidang kabinet.

Akhir bulan lalu, Pertamina dinyatakan kalah dalam proses banding (*fifth circuit*) di Pengadilan New Orleans, Amerika Serikat. Pihak pengadilan menguatkan keputusan arbitrase internasional pada 2000, yang memenangkan KBC dalam per-

seteruannya dengan Pertamina pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha di Jawa Barat.

Pengadilan Amerika Serikat berpendapat, Pertamina harus membayar klaim karena kedua pihak telah sepakat membawa masalah itu ke badan arbitrase internasional. Keputusan itu juga membuat Indonesia tidak bisa berkelit atau menolak pembayaran ganti rugi kepada KBC. "Itu hukum yang harus ditaati," kata Direktur Keuangan Pertamina Alfred H. Rohimone beberapa waktu lalu.

Pihak Departemen Keuangan hingga kini belum memberikan persetujuan atas rencana pembayaran dengan menggunakan dana yang tersimpan di bank-bank Amerika. Menurut Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution, uang yang tersimpan di Bank of New York dan Bank of America adalah uang pemerintah dan harus kembali ke pemerintah.

● data meutia uning

26

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

Medco Masih Pertimbangkan Akuisisi BP

Selain biaya akuisisi, pemilik baru harus mengeluarkan US\$ 350 juta untuk pengembangan.

JAKARTA — PT Medco Energi hingga kini belum menaikkan harga penawarannya untuk mengakuisisi ladang gas Kangean, Jawa Timur, dan Muria, Jawa Tengah. Perusahaan minyak dan gas nasional itu, hingga kini masih mempertimbangkan rencana pengambilalihan ladang gas yang dikelola BP Indonesia.

Anggota Dewan Penasihat Medco Arifin Panigoro mengatakan, hingga kini pihaknya masih mempertimbangkan untuk

mengambil ladang gas tersebut. Menurut dia, BP telah menanyakan kepada Medco apakah akan menaikkan harga penawaran dari pesaingnya atau tidak. "Sampai sekarang kami masih berpikir," ujarnya kemarin.

Arifin menjelaskan, pesaing utama Medco untuk mengakuisisi ladang gas Kangean dan Muriam adalah perusahaan nasional Cina, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). "Perusahaan Cina itu katanya sudah memberikan harga penawaran sebesar US\$ 120 juta, kami diminta untuk memberikan penawaran lebih tinggi," katanya.

Ketika ditanya berapa harga penawaran yang diberikan oleh Medco, Arifin mengatakan tidak ingat nilainya. "Yang pasti angkanya di bawah penawaran

CNOOC," ujarnya. Dia juga tidak dapat menjelaskan, apakah pihaknya akan menaikkan harga atau membatalkan rencana pembelian ladang gas tersebut.

Perusahaan minyak dan gas asal Inggris itu berencana menjual saham anak perusahaannya di lapangan gas Muria, Jawa Tengah, dan Kangean, Jawa Timur. Penawaran dilakukan sejak Maret dan pemenangnya akan diumumkan pada April 2004. Selain mengelola kedua ladang gas tersebut, BP merupakan kontraktor bagi hasil ladang gas Tangguh di Papua dengan cadangan 14,4 triliun kaki kubik.

Menurut Arifin, selain mengeluarkan biaya akuisisi pihaknya juga harus menganggarkan dana untuk pengembangan sebesar US\$ 350 juta. "Dana tersebut

untuk pengeboran sumur-sumur baru dan pengembangan infrastruktur," katanya.

Pada tahun ini, kata Arifin, selain berencana mengakuisisi ladang gas yang dikelola BP, Medco juga sedang melakukan penawaran untuk membeli saham novus dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu.

Hingga kini Medco masih melakukan negosiasi dengan Novus dengan memberikan harga penawaran sebesar Aus\$ 1,74 per saham. "Untuk proyek Wayang Windu kami masih pertimbangkan karena harganya mencapai US\$ 200 juta," ujar Arifin. Selain Medco, Pertamina telah menyatakan kesediaannya untuk membeli proyek listrik swasta tersebut dari Unocal.

Sementara itu, Wakil Ketua

Komisi Energi DPR Agungman Efendi mengatakan, akan melakukan kajian ulang atas permintaan perpanjangan kontrak Terang Sirasun. "Kami akan kaji kembali persetujuan yang pernah diberikan komisi jika saham BP akan dijual," ujarnya kemarin.

Menurut dia, DPR memberikan persetujuan perpanjangan kontrak karena adanya komitmen dari BP untuk mengembangkan ladang gas di Jawa Timur. "Tapi, kalau mau dijual ya harus ditinjau kembali persetujuan yang pernah diberikan," katanya. Direncanakan, pengkajian atas persetujuan tersebut akan dilakukan pada masa persidangan minggu depan.

Sebelumnya, pemerintah kemungkinan tidak akan menyetujui permintaan perpanjangan kontrak BP Indonesia di wilayah ker-

ja (blok) Terang Sirasun, Kangean, Jawa Timur. Menurut Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika, rencana penjualan saham perusahaan BP kepada pihak lain telah mempengaruhi persetujuan pemerintah. "Mereka tampaknya tidak serius meminta perpanjangan dengan adanya rencana penjualan saham," ujarnya.

Kardaya mengatakan, saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam atas permintaan perpanjangan kontrak. Dalam proses tersebut, pemerintah meminta keseriusan BP untuk mengembangkan lapangan gas Terang Sirasun. "Tapi, jika tiba-tiba dijual kepada pihak lain, ya, nanti dulu," katanya.

● aji nur yasin/retno sulistyowati-trn

27

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2004

Bupati Batalkan Kerjasama Pengelolaan Gas Secara Sepihak

Bekasi, NERACA

Direktur Utama PT Maruta Bumi Prima, Sutedjo Ngadiman, menilai Bupati Bekasi, Saleh Manaf bertindak arogan membatalkan kontrak kerjasama pengolahan gas Pertamina di Tambun, antara BUMD Bekasi dengan perusahaan itu secara sepihak.

"Pembatalan kerjasama pengolahan gas pertamina antara PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BUMD) Kabupaten Bekasi dengan PT Maruta Bumi Prima atas perintah Bupati Bekasi," katanya, Rabu (14/4).

Ulah bupati Bekasi itu jelas merugikan perusahaan tersebut yang bakal mengolah gas Pertamina di Tambun, Kabupaten Bekasi, bahkan berdampak kepada kekhawatiran investor lain yang ingin menanamkan modalnya. "Kami sudah mengeluarkan uang banyak untuk memulai proyek tersebut tetapi tiba-tiba kerjasama pengolahan gas dibatalkan atas perintah Bupati Bekasi," kata Sutedjo Ngadiman.

Perjanjian kerjasama pengolahan gas Pertamina di Tambun itu bernomor :158/X/BBWM/2003-020/MBP-BBD/10/03, tertanggal 22 Oktober 2003 ditandatangani kedua belah pihak dan

sah secara hukum.

Kontrak kerjasama itu, tulis Antara, ditandatangani direktur PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BUMD) Kabupaten Bekasi, Daryanto dan Direktur Utama PT Maruta Bumi Prima, Sutedjo Ngadiman.

Dalam perjanjian kerjasama itu juga disebutkan, setelah 15 tahun Gas Processing Plant menjadi milik PT Bina Bangun Wibawa Mukti BUMD-nya Pemkab Bekasi.

Sebenarnya dalam kerjasama antara BUMD kabupaten Bekasi dengan PT Maruta Bumi Prima itu juga disebutkan berakhir 15 tahun mendatang.

Tetapi, secara mendadak perjanjian itu dibatalkan orang nomor satu di jajaran Pemkab Bekasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua.

Padahal, selama dalam proses mulai dari pengurusan surat izin, pembebasan tanah dan berbagai keperluan proyek, perusahaan itu telah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah.

Sutedjo Ngadiman, mengatakan kerjasama ini akan menguntungkan Pemkab Bekasi karena bakal mendapat keuntungan sebesar 30% dari laba bersih.(34)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 16																																												
TAHUN 2004																																												

Aman, Jalur Ekspor Minyak Irak Selatar

BAGHDAD – Kementerian Perminyakan Irak, Rabu (14/4), menuturkan, kelompok milisi muslim Shiah tidak menargetkan infrastruktur minyak di selatan Irak dalam perjuangan mereka melawan pasukan pendudukan pimpinan Amerika Serikat.

"Ekspor minyak berjalan normal, sesuai dengan sistem distribusi produk internal," jelas Assem Jihad, juru bicara Kementerian Perminyakan Irak kepada Reuters.

"Kami tidak melihat adanya sabotase. Laporan keamanan yang kami terima menyebutkan bahwa instalasi minyak utama kami di Basrah tidak

mengalami perubahan," lanjut Assem.

Perlawanan, yang dipimpin oleh imam Shiah Moqtada al-Sadr, pecah pekan lalu di Irak tengah dan selatan serta meningkatkan kecemasan bahwa kaum milisi dapat menyabotasi produksi minyak dan jaringan ekspor.

Kawasan Shiah Irak di selatan Baghdad adalah sumber paling besar bagi ekspor minyak Irak yang mencapai 1,9 juta barel per hari, terutama mengalir melalui dua terminal lepas pantai Teluk.

Sedangkan instalasi minyak di wilayah utara, terutama pipa ekspor yang beroperasi melalui

Turki ke Laut Mediterania mendapatkan serangan sejak perang meletus Maret 2003, kendati frekuensi serangan itu sedikit berkurang dalam beberapa bulan terakhir ini.

Kawasan utara Irak kebanyakan dihuni oleh kaum minoritas Arab Sunni, pendukung kuat mantan Presiden Saddam Hussein.

Sebaliknya, wilayah selatan Irak relatif lebih aman hingga meletus perlawanan milisi. Suatu konferensi minyak internasional yang dijadwalkan akan diadakan di kota pelabuhan, Basrah, pekan depan terpaksa dibatalkan.

Menurut sejumlah saksi

mata, kaum milisi Shiah merampok bank-bank, kantor polisi dan gedung-gedung pemerintah.

Siapkan Serangan

Sementara itu, tentara AS terus menghadang perlawanan kelompok radikal pimpinan imam a-Sadr, yang milisinya berusaha mempertahankan kendalanya atas kota suci Najaf dari serbuan tentara koalisi.

Pimpinan pasukan Bulgaria, yang tentaranya disebar di sekitar Karbala, mengatakan pasukan Amerika juga tengah menyiapkan sebuah operasi untuk mengendalikan wilayah ini setelah berakhirnya per-

ingatan keagamaan kaum Shiah.

Brigjen Mark Kimmitt, deputy direktur operasi militer koalisi, mengatakan, target operasi itu bukan kota-kota Shiah melainkan gerilyawan Mehdi pimpinan al-Sadr. "Kami akan memburu dan menghancurkan mereka," ujar Kimmitt seperti dikutip AFP.

Sadr, yang diduga berada di Najaf, dalam wawancara dengan jaringan televisi Lebanon mengatakan tidak akan pernah berbicara langsung dengan koalisi namun menyatakan diskusi dengan koalisi sedang dilakukan oleh empat pemuka Shiah di Irak. (c36/jn)